



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	INWASADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WAGUP
		-		

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASST	SEKDA	WAGUP
		-		

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	DINAS/PAJAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
		-		

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASST	SEKDA	WAKUP
		-		

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);

KASAB HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASE ¹⁾	SEKUR	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	-	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 331);
31. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 338/29/X/2025 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang

KABAG HUKUM	DINASRUM KANTOR	ASST	SEK	WABUP
		-		

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025; dan

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penyesuaian Atas Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

KAB. BOALEMO	DINAS DAERAH	ASST. DAERAH	SEK. DAERAH	WAKIL
		-		

6. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Boalemo.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Boalemo.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.857.606.086.308,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.52.606.849.552,98 (lima puluh dua miliar enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.804.999.236.755,02 (delapan ratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima koma nol dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH KANTOR	ASS II	SEKD	WABUP
		-		

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan /atau
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.81.228.963.308,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.7.936.548.371,02 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp.89.165.511.679,02 (delapan puluh sembilan milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma nol dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.12.919.391.229,44 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.8.844.234.738,02 (delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.763.625.967,46 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.816.240.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.378.816.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.195.056.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) bertambah sebesar

KABAG HUKUM	DINASISDAK PANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
		-		

Rp.116.653.612,00 (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp.7.116.653.612,00 (tujuh miliar seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah).

- (5) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.59.493.332.078,56 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan koma lima enam rupiah) berkurang sebesar Rp.1.403.155.979,00 (satu miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.58.090.176.099,56 (lima puluh delapan milyar sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.12.919.391.229,44 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.8.844.234.738,02 (delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.763.625.967,46 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari atas :
- pajak Reklame;
 - Pajak Sarang Burung Walet;
 - pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - pajak barang dan jasa tertentu (PBJT); dan/atau
 - opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan/atau
 - opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp.52.635.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.256.635.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

KABUPATEN HUMAS	DIREKTOR DAERAH	ASS KABUPATEN	SEK DAERAH	WABUP
		-		

- (3) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.228.800.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.570.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.658.400.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.580.818.715,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah); berkurang sebesar Rp.40.392.191,00 (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.540.426.524,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.299.548.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.78.045.550,00 (tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.377.594.350,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.410.806.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.492.266.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.5.903.072.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.690.325.898,26 (dua miliar enam ratus Sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh enam rupiah)

KABAG HUMAS	DINASERDAN KANTOR	ASEK	SEKDA	WABUP
				

bertambah sebesar Rp.3.577.512.275,04 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp.6.267.838.173,30 (enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh rupiah).

- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.499.891.816,18 (dua miliar empat ratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam belas koma delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.4.257.168.103,98 (empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tiga koma Sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.6.757.059.920,16 (enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh koma enam belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.1.816.240.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.378.816.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.195.056.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum;
 - retribusi jasa usaha;
 - retribusi Tempat Pelelangan; dan/atau
 - retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.855.000.00,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.366.696.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.221.696.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.691.240.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.27.880.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus

KABAG HUKUM	DINASRAN KANTOR	ASSN	SEKDA	WABUP
		-		

- delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.663.360.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang merupakan penerimaan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta, bertambah sebesar Rp.116.653.612,00 (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp.7.116.653.612,00 (tujuh miliar seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.59.493.332.078,56 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.1.403.155.979,00 (satu miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.58.090.176.099,56 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah) yang terdiri:
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan dari pengembalian;
 - g. pendapatan denda pajak daerah;
 - h. pendapatan BLUD; dan/atau

KABAG HUKUM	DINASIBAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
0	1	-	1	1

- i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp.1.051.000.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.445.463.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.295.463.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.850.904.771,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.56.447.869.078,56 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.4.026.597.750,00 (empat miliar dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.52.421.271.328,56 (lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh enam rupiah).

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
		-		

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.776.377.123.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.61.386.197.924,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.714.990.925.076,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.762.872.123.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.65.715.176.568,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.697.156.946.432,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.505.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.762.872.123.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.65.715.176.568,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.697.156.946.432,00 (enam ratus sembilan puluh

KABAG HUKUM	DISKUSI MANTOR	ASSE	SEKD	WABUP
		-		

tujuh miliar seratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri dari:

- a. dana desa;
- b. insentif fiskal;
- c. dana bagi hasil (DBH);
- d. dana alokasi umum (DAU); dan/atau
- e. dana alokasi khusus (DAK).

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.679.459.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.830.378.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.803.171.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.478.321.450.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.27.782.276.965,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.450.539.173.035,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.197.237.665.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.37.932.899.603,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.159.304.765.397,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 11

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASEK	SEK	WABUP
		-		

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.13.505.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yakni pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.505.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.842.800.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yakni pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.842.800.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah semula sebesar Rp.857.706.086.308,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.23.312.244.936,13 (dua puluh tiga miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp.834.393.841.371,87 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
		-		

- c. belanja tidak terduga; dan/atau
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.622.567.521.899,06 (enam ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma nol enam rupiah), berkurang sebesar Rp.15.227.281.826,19 (lima belas miliar dua ratus dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.607.340.240.072,87 (enam ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribui tujuh puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan/atau
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.415.500.447.702,19 (empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.373.515.787,09 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma nol Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.411.126.931.915,10 (empat ratus sebelas miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima belas koma sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.207.783.812,87 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.9.288.566.039,10 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh Sembilan koma sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp.189.919.217.773,77 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah).

KABAG HUKUM	DINASISDAW KANTOR	ASEK	SEKDA	WABUP
		-		

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.859.290.384 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.565.200.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.294.090.384,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.415.500.447.702,19 (empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah koma sembilan belas) berkurang sebesar Rp.4.373.515.787,09 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma nol sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.411.126.931.915,10 (empat ratus sebelas miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima belas koma sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - belanja tambahan penghasilan ASN;
 - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan/atau
 - belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.114.689.596,18 (dua ratus delapan puluh satu miliar seratus empat belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 14.500.277.257,53 (empat belas miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma lima tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 266.614.412.338,65 (dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus empat belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah).

KABAG Hukum	DINASRACAN KANTOR	ASSM	SEKDA	WABUP
		-		

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.253.493.397,01 (sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma satu rupiah) bertambah sebesar Rp.12.626.956.446,19 (dua belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.108.880.449.843,20 (serratus delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.931.429.680,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.480.897.523,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.12.412.327.203,00 (dua belas miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.338.376.502,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 50.266.484,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.288.110.018,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu delapan belas rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebessar Rp.25.151.578.527,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.730.826.014,75 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat belas koma tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.22.420.752.512,25 (dua puluh dua

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
		-		

miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua belas koma dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.199.207.783.812,87 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.9.288.566.039,10 (sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh Sembilan koma sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp.189.919.217.773,77 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - belanja barang dan jasa BOSP;
 - belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan/atau
 - belanja barang dan jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.726.535.684,19 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.235.924.975,80 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.42.490.610.708,39 (empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan koma tiga puluh Sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.690.585.165,68 (enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.540.427.455,49 (satu miliar lima ratus empat

KABAG HUKUM	DINASISIRAN KANTOR	ASSI	SEKTA	WABUP
				

puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima koma empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 64.231.012.621,17 (enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua belas ribu enam ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.696.728.345,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.1.216.873.475,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) Sehingga menjadi Rp. 4.479.854.870,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.005.830.967,00 (dua puluh tujuh milyar lima juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.5.042.787.214,06 (lima miliar empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas koma nol enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.963.043.752,94 (dua puluh satu miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.808.865.000,00 (delapan ratus delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.654.950.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.463.815.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.21.445.872.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.5.605.163.173,41 (lima miliar enam ratus lima juta serratus enam puluh tiga ribu serratus tujuh puluh tiga koma empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.840.708.826,59 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh juta

KABAG HUKUM	DINASDAM KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
		-		

tujuh ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah.

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.917.154.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.604.155.000,00 (enam ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.7.521.309.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.916.212.651,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.012.650.343,68 (dua miliar dua belas juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga koma enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.31.928.862.994,68 (tiga puluh satu miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat koma enam puluh delapan rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.859.290.384,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.565.200.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.294.090.384,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;;
 - belanja hibah dana BOS;
 - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.215.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.1.867.200.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu

KABAG HUKUM	DIREKTUR KANTOR	ASS	SEK	WABUP
		-		

- rupiah) sehingga menjadi Rp.2.347.800.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 769.295.384 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.874.995.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.176.995.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.114.111.660.632,00 (seratus empat belas miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.6.650.128.552,00 (enam miliar enam ratus lima puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 107.461.532.080,00 (seratus tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya;
 - belanja modal aset lainnya; dan/atau
 - belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.022.160.600,00 (tiga puluh lima miliar dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus

KABAG HUMAS	DINASRADA KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
		-		

rupiah) bertambah sebesar Rp.12.749.854.307,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 47.772.014.907,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.34.947.626.032,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.354.281.813,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp.32.593.344.219,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus Sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.951.874.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.21.793.116.322,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.22.158.757.678,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.942.415.276,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

KABAG HUKUM	DIREKTORAT KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
		-		

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.120.026.903.776,94 (seratus dua puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.434.834.557,94 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 118.592.069.219,00 (serratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan/atau
 - belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.473.563.122,94 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.922.505.110,06 (sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus lima ribu serratus sepuluh koma nol enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.396.068.233,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten boalemo dan desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten boalemo kepada pemerintah desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.118.553.340.654,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.2.357.339.668,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.116.196.000.986,00 (serratus enam belas miliar serratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

KAB. BO HUMAYIM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS (H)	SEKDA	WABUP
		-		

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp.29.294.604.616,85 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.29.394.604.616,85 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bertambah sebesar Rp.29.294.604.616,85 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 29.394.604.616,85 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh lima rupiah) yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 24

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

KABAG KUMHIMA	DINASISDAK KANTOR	ASS KUMHIMA	SEKDA	WABUP
		-		

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

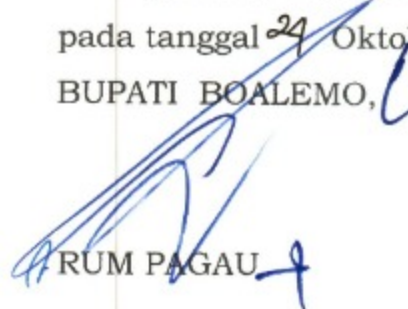
KABAG HUKUM	DINASBADA KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
				

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

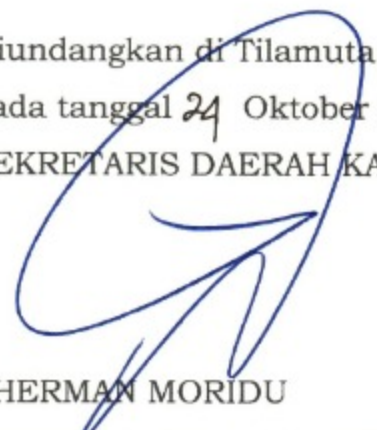
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal ~~24~~ Oktober 2025
BUPATI BOALEMO,



RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal ~~24~~ Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 19)



KABUPATEN BOALEMO

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.228.963.308,00	89.165.511.679,02	7.936.548.371,02
4.1.01	Pajak Daerah	12.919.391.229,44	21.763.625.967,46	8.844.234.738,02
4.1.01.09	Pajak Reklame	204.000.000,00	256.635.000,00	52.635.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	165.000.000,00	172.660.000,00	7.660.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	165.000.000,00	172.660.000,00	7.660.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	67.475.000,00	32.475.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	67.475.000,00	32.475.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.200.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.200.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.200.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.228.800.000,00	658.400.000,00	-570.400.000,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	765.500.000,00	401.500.000,00	-364.000.000,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	765.500.000,00	401.500.000,00	-364.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	259.300.000,00	136.300.000,00	-123.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	259.300.000,00	136.300.000,00	-123.000.000,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.29	Pajak Tanah Diatome	160.000.000,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
4.1.01.14.29.0001	Pajak Tanah Diatome	160.000.000,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	3.900.000,00	600.000,00	-3.300.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	3.900.000,00	600.000,00	-3.300.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000,00	0,00	-100.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.580.818.715,00	1.540.426.524,00	-40.392.191,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.580.818.715,00	1.540.426.524,00	-40.392.191,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.580.818.715,00	1.540.426.524,00	-40.392.191,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	299.548.800,00	377.594.350,00	78.045.550,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	157.548.800,00	81.057.600,00	-76.491.200,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	157.548.800,00	81.057.600,00	-76.491.200,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	142.000.000,00	296.536.750,00	154.536.750,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	142.000.000,00	296.536.750,00	154.536.750,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.410.806.000,00	5.903.072.000,00	1.492.266.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	500.000.000,00	892.000.000,00	392.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	450.000.000,00	842.000.000,00	392.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	3.750.780.000,00	4.800.000.000,00	1.049.220.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.750.780.000,00	4.800.000.000,00	1.049.220.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	147.186.000,00	210.072.000,00	62.886.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	51.678.000,00	68.160.000,00	16.482.000,00
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	48.732.000,00	81.072.000,00	32.340.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	46.776.000,00	60.840.000,00	14.064.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	12.840.000,00	1.000.000,00	-11.840.000,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	7.440.000,00	1.000.000,00	-6.440.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.690.325.898,26	6.267.838.173,30	3.577.512.275,04
4.1.01.20.01	Opsen PKB	2.690.325.898,26	6.267.838.173,30	3.577.512.275,04
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2.690.325.898,26	6.267.838.173,30	3.577.512.275,04
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.499.891.816,18	6.757.059.920,16	4.257.168.103,98
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.499.891.816,18	6.757.059.920,16	4.257.168.103,98
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.499.891.816,18	6.757.059.920,16	4.257.168.103,98
4.1.02	Retribusi Daerah	1.816.240.000,00	2.195.056.000,00	378.816.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	855.000.000,00	1.221.696.000,00	366.696.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	85.000.000,00	100.192.000,00	15.192.000,00

KABAG HUKUM	DIREKSI KANTOR	ASST	SEKDA	WAGUP
		-		

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	85.000.000,00	100.192.000,00	15.192.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	206.304.000,00	56.304.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	206.304.000,00	56.304.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	620.000.000,00	915.200.000,00	295.200.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	500.000.000,00	719.840.000,00	219.840.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	120.000.000,00	195.360.000,00	75.360.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	691.240.000,00	663.360.000,00	-27.880.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	196.600.000,00	158.000.000,00	-38.600.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	31.000.000,00	1.000.000,00	-30.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	22.500.000,00	7.000.000,00	-15.500.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	128.100.000,00	150.000.000,00	21.900.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	110.000.000,00	104.400.000,00	-5.600.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	110.000.000,00	104.400.000,00	-5.600.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	334.640.000,00	350.960.000,00	16.320.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	334.640.000,00	350.960.000,00	16.320.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	270.000.000,00	310.000.000,00	40.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.000.000,00	310.000.000,00	40.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.000.000,00	310.000.000,00	40.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.116.653.612,00	116.653.612,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	7.000.000.000,00	7.116.653.612,00	116.653.612,00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	7.000.000.000,00	7.116.653.612,00	116.653.612,00
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	7.000.000.000,00	7.116.653.612,00	116.653.612,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.493.332.078,56	58.090.176.099,56	-1.403.155.979,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.100.000.000,00	1.051.000.000,00	-49.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00
4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.445.463.000,00	1.150.000.000,00	-295.463.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.445.463.000,00	1.000.000.000,00	-445.463.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.445.463.000,00	1.000.000.000,00	-445.463.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	500.000,00	500.000,00
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	500.000,00	500.000,00

KABAG MUKAM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASSN	SEKJA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00	500.000,00	500.000,00
4.1.04.12.19.0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	500.000,00	500.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.850.904.771,00	2.850.904.771,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.840.904.771,00	2.840.904.771,00
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.840.904.771,00	2.840.904.771,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	56.447.869.078,56	52.421.271.328,56	-4.026.597.750,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	33.840.635.740,00	1.718.476.000,00	-32.122.159.740,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	33.840.635.740,00	1.718.476.000,00	-32.122.159.740,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	22.428.330.138,56	50.633.013.328,56	28.204.683.190,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	22.428.330.138,56	50.633.013.328,56	28.204.683.190,00
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	118.603.200,00	0,00	-118.603.200,00
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	118.603.200,00	0,00	-118.603.200,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	60.300.000,00	69.782.000,00	9.482.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	60.300.000,00	69.782.000,00	9.482.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	776.377.123.000,00	714.990.925.076,00	-61.386.197.924,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.872.123.000,00	697.156.946.432,00	-65.715.176.568,00
4.2.01.05	Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.830.378.000,00	8.830.378.000,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8.830.378.000,00	8.830.378.000,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8.830.378.000,00	8.830.378.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.803.171.000,00	8.803.171.000,00	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	5.139.602.000,00	5.139.602.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	2.329.646.000,00	2.329.646.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.809.956.000,00	2.725.432.000,00	-84.524.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	84.524.000,00	84.524.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.522.614.000,00	1.522.614.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
		-		

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	10.036.000,00	340.000,00	-9.696.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	9.696.000,00	9.696.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	269.389.000,00	269.389.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.243.189.000,00	1.243.189.000,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.140.955.000,00	2.140.955.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	2.140.955.000,00	2.140.955.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	478.321.450.000,00	450.539.173.035,00	-27.782.276.965,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	379.443.941.000,00	379.294.849.035,00	-149.091.965,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	379.443.941.000,00	379.294.849.035,00	-149.091.965,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	98.877.509.000,00	71.244.324.000,00	-27.633.185.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.323.138.000,00	2.323.138.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	41.249.851.000,00	41.249.851.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	27.671.335.000,00	27.671.335.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	27.633.185.000,00	0,00	-27.633.185.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	197.237.665.000,00	159.304.765.397,00	-37.932.899.603,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	88.019.110.000,00	51.826.027.388,00	-36.193.082.612,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	1.947.332.000,00	1.947.332.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	52.763.604.000,00	49.878.695.388,00	-2.884.908.612,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	33.308.174.000,00	0,00	-33.308.174.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	109.218.555.000,00	107.478.738.009,00	-1.739.816.991,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	59.000.972.000,00	59.000.972.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	710.250.000,00	710.250.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.017.263.000,00	4.017.263.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	505.690.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	18.700.612.000,00	18.560.431.086,00	-140.180.914,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.374.000.000,00	1.374.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.181.660.000,00	4.181.660.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	375.320.000,00	375.320.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.316.992.000,00	7.316.992.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KANTOR	ASST	SEKJA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	296.748.000,00	296.748.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.114.248.000,00	7.055.281.923,00	-2.058.966.077,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.489.800.000,00	3.489.800.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0,00	459.330.000,00	459.330.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.505.000.000,00	17.833.978.644,00	4.328.978.644,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	13.505.000.000,00	17.833.978.644,00	4.328.978.644,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.505.000.000,00	17.833.978.644,00	4.328.978.644,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	618.609.982,00	618.609.982,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	703.368.662,00	703.368.662,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.500.000.000,00	8.000.000.000,00	1.500.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.000.000.000,00	8.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	842.800.000,00	842.800.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	842.800.000,00	842.800.000,00
4.3.01.06	Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis	0,00	842.800.000,00	842.800.000,00
4.3.01.06.01	Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis	0,00	842.800.000,00	842.800.000,00
4.3.01.06.01.0001	Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis	0,00	842.800.000,00	842.800.000,00
	Jumlah Pendapatan	857.606.086.308,00	804.999.236.755,02	-52.606.849.552,98
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	622.567.521.899,06	607.340.240.072,87	-15.227.281.826,19
5.1.01	Belanja Pegawai	415.500.447.702,19	411.126.931.915,10	-4.373.515.787,09
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	281.114.689.596,18	266.614.412.338,65	-14.500.277.257,53
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	210.115.239.633,88	200.548.324.015,90	-9.566.915.617,98
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	164.618.146.117,88	152.797.390.468,90	-11.820.755.648,98
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.497.093.516,00	47.750.933.547,00	2.253.840.031,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.559.073.511,54	19.085.508.522,07	-473.564.989,47
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.620.452.610,22	14.904.516.800,49	-715.935.809,73
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.938.620.901,32	4.180.991.721,58	242.370.820,26
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.013.684.912,00	3.733.823.373,92	-279.861.538,08
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.013.684.912,00	3.733.823.373,92	-279.861.538,08
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.545.565.700,00	16.067.569.170,00	-477.996.530,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.043.438.700,00	11.431.110.280,00	-612.328.420,00

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.502.127.000,00	4.636.458.890,00	134.331.890,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.186.698.858,00	2.195.757.600,00	9.058.742,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.165.698.858,00	2.100.886.000,00	-64.812.858,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	21.000.000,00	94.871.600,00	73.871.600,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.965.721.607,00	11.622.334.724,80	-343.386.882,20
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.236.721.644,20	8.745.913.954,60	-490.807.689,60
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.728.999.962,80	2.876.420.770,20	147.420.807,40
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	238.692.633,46	239.456.850,25	764.216,79
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	238.692.633,46	239.456.850,25	764.216,79
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.132.516,30	2.785.086,86	-347.429,44
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.509.374,98	2.096.022,21	-413.352,77
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	623.141,32	689.064,65	65.923,33
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	14.558.427.054,00	11.190.399.824,85	-3.368.027.229,15
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12.440.778.612,00	9.072.751.382,85	-3.368.027.229,15
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.117.648.442,00	2.117.648.442,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	482.114.276,00	482.114.276,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	374.861.466,00	374.861.466,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	107.252.810,00	107.252.810,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.446.338.894,00	1.446.338.894,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.124.592.322,00	1.124.592.322,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	321.746.572,00	321.746.572,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	96.253.493.397,01	108.880.449.843,20	12.626.956.446,19
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.281.904.546,00	8.524.252.997,50	2.242.348.451,50
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.281.904.546,00	8.524.252.997,50	2.242.348.451,50
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.805.900.000,00	1.371.327.000,00	-1.434.573.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.805.900.000,00	1.371.327.000,00	-1.434.573.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.360.979.498,01	33.287.937.029,70	11.926.957.531,69
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	21.360.979.498,01	33.287.937.029,70	11.926.957.531,69
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.804.709.353,00	65.696.932.816,00	-107.776.537,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	4.930.731,00	7.037.412,00	2.106.681,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	16.750.000,00	29.882.000,00	13.132.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	430.140,00	33.500,00	-396.640,00

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	6.834.000,00	8.597.273,00	1.763.273,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	125.651.130,00	0,00	-125.651.130,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	174.200,00	87.100,00	-87.100,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.164.800,00	22.056.400,00	-19.108.400,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	52.957.427,00	51.604.289,00	-1.353.138,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.034.885,00	15.211.866,00	5.176.981,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.847.500,00	3.356.432,00	508.932,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	6.911.184,00	6.911.184,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.770.000,00	30.659.200,00	9.889.200,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.365.100,00	335.000,00	-2.030.100,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	3.685.000,00	4.500.000,00	815.000,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.210.440,00	11.757.160,00	546.720,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	9.045.000,00	9.045.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	59.000.972.000,00	59.000.972.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.017.263.000,00	4.017.263.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	710.250.000,00	710.250.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.765.699.000,00	1.765.699.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.931.429.680,00	12.412.327.203,00	480.897.523,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	567.032.838,00	567.032.838,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	567.032.838,00	567.032.838,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.363.400,00	82.363.400,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.363.400,00	82.363.400,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	92.888.320,00	92.888.320,00	0,00

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASS	SEK	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	92.888.320,00	92.888.320,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	72.132.000,00	72.132.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	72.132.000,00	72.132.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	842.233.000,00	842.233.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	842.233.000,00	842.233.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	103.657.200,00	103.657.200,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	103.657.200,00	103.657.200,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	111.102.922,00	238.000.445,00	126.897.523,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	111.102.922,00	238.000.445,00	126.897.523,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.943.360.000,00	4.297.360.000,00	354.000.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.893.360.000,00	4.247.360.000,00	354.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.704.160.000,00	3.704.160.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.704.160.000,00	3.704.160.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	338.376.502,00	288.110.018,00	-50.266.484,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.246.500,00	58.246.500,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.246.500,00	58.246.500,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.154.510,00	8.154.510,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.154.510,00	8.154.510,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.843.700,00	104.843.700,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.843.700,00	104.843.700,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.652.740,00	8.652.740,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.652.740,00	8.652.740,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	976.971,00	976.971,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	976.971,00	976.971,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.958,00	2.958,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.958,00	2.958,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	5.241.600,00	5.241.600,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	5.241.600,00	5.241.600,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	127.531.163,00	66.251.115,00	-61.280.048,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.428.569,00	3.466.188,00	1.037.619,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	8.250.000,00	14.718.000,00	6.468.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	211.860,00	16.500,00	-195.360,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.366.000,00	4.234.478,00	868.478,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	61.887.870,00	0,00	-61.887.870,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	85.800,00	42.900,00	-42.900,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.275.000,00	10.863.600,00	-9.411.400,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.083.509,00	25.417.038,00	-666.471,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.942.555,00	7.492.411,00	2.549.856,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	29.967.960,00	35.739.924,00	5.771.964,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.402.500,00	1.653.168,00	250.668,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.475.000,00	3.404.016,00	929.016,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.230.000,00	15.100.800,00	4.870.800,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.243.900,00	2.623.500,00	-620.400,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	825.000,00	825.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.815.000,00	1.887.600,00	72.600,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.521.560,00	5.790.840,00	269.280,00

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	510.880.000,00	-200.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	25.151.578.527,00	22.420.752.512,25	-2.730.826.014,75
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	25.151.578.527,00	22.420.752.512,25	-2.730.826.014,75
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	25.151.578.527,00	22.420.752.512,25	-2.730.826.014,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.207.783.812,87	189.919.217.773,77	-9.288.566.039,10
5.1.02.01	Belanja Barang	44.726.535.684,19	42.490.610.708,39	-2.235.924.975,80
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.476.535.684,19	42.465.050.708,39	-2.011.484.975,80
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	26.906.000,00	144.701.600,00	117.795.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.647.917.095,00	1.876.600.636,50	228.683.541,50
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	74.295.000,00	62.664.000,00	-11.631.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48.750.000,00	897.566.000,00	848.816.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.136.000,00	3.136.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.715.200,00	762.800,00	-2.952.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	504.536.000,00	148.636.000,00	-355.900.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.065.680.130,00	3.946.311.041,00	-119.369.089,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	298.249.605,00	570.974.040,00	272.724.435,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	17.772.000,00	5.680.000,00	-12.092.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.718.925,00	3.718.925,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	745.395.590,28	597.572.581,28	-147.823.009,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	576.721.020,00	620.053.189,90	43.332.169,90
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.272.199.186,91	1.120.806.753,31	-151.392.433,60
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	90.592.750,00	76.320.000,00	-14.272.750,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	420.244.914,00	409.330.256,25	-10.914.657,75
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	233.390.026,00	329.451.014,65	96.060.988,65
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	198.629.235,00	220.099.037,00	21.469.802,00

KAB. GAG. MELUKAJI	DINAS/BLUDAS KANTOR	ASS M	SEKDA	WABUP
		-		

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.600.000,00	2.100.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	58.506.300,00	157.407.500,00	98.901.200,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.671.000,00	300.843.568,00	248.172.568,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.504.891.440,00	1.764.512.459,00	259.621.019,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	341.670.000,00	341.670.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.976.926.956,00	14.625.320.666,00	1.648.393.710,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.100.000.000,00	2.640.500.000,00	1.540.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.138.754.851,00	1.557.742.824,00	-581.012.027,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.873.719.300,00	5.126.728.491,50	-1.746.990.808,50
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.651.616.160,00	1.994.271.325,00	342.655.165,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.461.996.000,00	366.465.000,00	-5.095.531.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.536.120.000,00	1.136.120.000,00	-400.000.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	269.535.000,00	274.865.000,00	5.330.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	94.200.000,00	233.350.000,00	139.150.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	27.450.000,00	0,00	-27.450.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.450.000,00	76.350.000,00	12.900.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	53.750.000,00	66.900.000,00	13.150.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	60.000.000,00	106.000.000,00	46.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	115.600.000,00	235.300.000,00	119.700.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.200.000,00	16.400.000,00	11.200.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	186.900.000,00	389.970.000,00	203.070.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	13.060.000,00	13.060.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	13.060.000,00	13.060.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	250.000.000,00	12.500.000,00	-237.500.000,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
5.1.02.01.04.0111	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTON	ASS	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02	Belanja Jasa	62.690.585.165,68	64.231.012.621,17	1.540.427.455,49
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.009.130.015,68	45.300.594.886,17	4.291.464.870,49
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.810.550.000,00	2.429.179.988,00	-381.370.012,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.485.100.000,00	1.338.757.500,00	-146.342.500,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	118.000.000,00	204.600.000,00	86.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	814.150.000,00	1.224.191.170,00	410.041.170,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	10.000.000,00	6.400.000,00	-3.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	14.400.000,00	38.690.333,00	24.290.333,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	435.600.000,00	343.200.000,00	-92.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.530.900.000,00	1.980.671.250,00	449.771.250,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.282.970.000,00	8.545.532.631,00	-1.737.437.369,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	430.200.000,00	648.262.500,00	218.062.500,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.165.800.000,00	1.796.020.230,00	630.220.230,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	259.500.000,00	367.588.307,00	108.088.307,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	81.600.000,00	122.400.000,00	40.800.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	168.300.000,00	240.170.835,00	71.870.835,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	38.250.000,00	467.025.000,00	428.775.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	15.300.000,00	0,00	-15.300.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.976.700.000,00	6.951.695.912,49	-1.025.004.087,51
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	63.300.000,00	144.991.522,00	81.691.522,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	807.650.000,00	2.611.742.500,00	1.804.092.500,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.921.100.000,00	1.994.780.000,00	73.680.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.733.850.000,00	3.254.350.000,00	1.520.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	168.950.000,00	281.750.000,00	112.800.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	61.200.000,00	0,00	-61.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.023.300.000,00	1.502.585.000,00	479.285.000,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	54.000.000,00	0,00	-54.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	100.300.000,00	95.274.985,00	-5.025.015,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	24.263.600,00	63.004.185,00	38.740.585,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.500.000,00	102.700.000,00	98.200.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	103.377.580,00	304.745.580,00	201.368.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	225.000.000,00	650.000.000,00	425.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	59.650.000,00	19.650.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	147.295.000,00	147.295.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.900.000,00	12.017.500,00	5.117.500,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	631.900.000,00	1.308.042.730,00	676.142.730,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	418.498.228,00	415.960.914,00	-2.537.314,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.471.532.307,68	2.227.746.121,68	-243.786.186,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.268.900.800,00	1.199.112.282,00	-69.788.518,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	33.265.000,00	45.565.000,00	12.300.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	557.000.000,00	264.501.300,00	-292.498.700,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	166.917.500,00	302.583.610,00	135.666.110,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	957.000.000,00	1.044.000.000,00	87.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	85.000.000,00	55.000.000,00	-30.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	104.500.000,00	42.000.000,00	-62.500.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	65.960.000,00	61.511.000,00	-4.449.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.289.356.150,00	13.034.451.008,00	2.745.094.858,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	1.417.233.408,00	1.417.233.408,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.580.693.750,00	0,00	-2.580.693.750,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.317.542.400,00	7.317.542.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	3.485.748.800,00	3.485.748.800,00

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASST II	SEK	WABUP
		-		

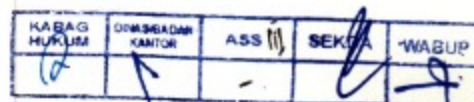
KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	241.755.840,00	241.755.840,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	161.170.560,00	161.170.560,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	250.000.000,00	75.000.000,00	-175.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	141.120.000,00	336.000.000,00	194.880.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.769.150.000,00	927.904.000,00	-841.246.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	858.400.000,00	523.754.000,00	-334.646.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	203.300.000,00	43.300.000,00	-160.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	198.000.000,00	0,00	-198.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	31.200.000,00	19.000.000,00	-12.200.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	478.250.000,00	320.350.000,00	-157.900.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.918.842.000,00	2.975.476.000,00	-943.366.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.671.842.000,00	2.787.176.000,00	-884.666.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	1.000.000,00	-29.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	100.000.000,00	50.700.000,00	-49.300.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
5.1.02.02.07.0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.295.000.000,00	470.000.000,00	-2.825.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	2.050.000.000,00	90.000.000,00	-1.960.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
		-		

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	250.000.000,00	70.000.000,00	-180.000.000,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	895.000.000,00	180.000.000,00	-715.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	820.000.000,00	384.940.727,00	-435.059.273,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	369.665.726,00	369.665.726,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	220.000.000,00	15.275.001,00	-204.724.999,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	633.976.000,00	629.976.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	37.056.000,00	37.056.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	112.750.000,00	112.500.000,00	-250.000,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	484.170.000,00	480.420.000,00	-3.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	920.131.000,00	468.820.000,00	-451.311.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	191.645.000,00	357.720.000,00	166.075.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	517.686.000,00	111.100.000,00	-406.586.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	210.800.000,00	0,00	-210.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.696.728.345,00	4.479.854.870,00	-1.216.873.475,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.005.235.750,00	1.143.987.788,00	138.752.038,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	180.000.000,00	40.000.000,00	-140.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	305.700.000,00	265.000.000,00	-40.700.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	176.500.000,00	353.850.000,00	177.350.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.005.750,00	100.000.000,00	19.994.250,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	20.240.000,00	20.240.000,00

KABAG MUMUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEK	WABUP
		-		

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.500.000,00	16.500.000,00	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	116.630.000,00	141.860.000,00	25.230.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.190.000,00	54.070.000,00	21.880.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.880.000,00	0,00	-4.880.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	51.594.188,00	51.594.188,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	69.080.000,00	66.023.600,00	-3.056.400,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.250.000,00	14.350.000,00	-7.900.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	497.869.605,00	1.551.741.472,00	1.053.871.867,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	497.869.605,00	1.502.246.183,00	1.004.376.578,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	34.495.289,00	34.495.289,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.191.296.590,00	1.781.799.210,00	-2.409.497.380,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.971.296.590,00	1.687.899.210,00	-1.283.397.380,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	650.000.000,00	0,00	-650.000.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	200.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00
5.1.02.03.04.0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	2.326.400,00	2.326.400,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	2.326.400,00	2.326.400,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.005.830.967,00	21.963.043.752,94	-5.042.787.214,06
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.005.830.967,00	21.963.043.752,94	-5.042.787.214,06
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.225.885.247,00	18.489.370.460,94	-1.736.514.786,06
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.054.575.000,00	1.409.640.000,00	-2.644.935.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.414.915.720,00	1.856.173.292,00	-558.742.428,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	298.455.000,00	207.860.000,00	-90.595.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	808.865.000,00	1.463.815.000,00	654.950.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	275.850.000,00	292.500.000,00	16.650.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	227.850.000,00	165.900.000,00	-61.950.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	48.000.000,00	101.600.000,00	53.600.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	533.015.000,00	1.171.315.000,00	638.300.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	208.415.000,00	362.415.000,00	154.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	324.600.000,00	808.900.000,00	484.300.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	21.445.872.000,00	15.840.708.826,59	-5.605.163.173,41
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	21.245.682.000,00	14.541.432.284,59	-6.704.249.715,41
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.871.682.000,00	13.253.956.073,59	-6.617.725.926,41
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.374.000.000,00	1.287.476.211,00	-86.523.789,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	120.000.000,00	1.207.473.842,00	1.087.473.842,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	1.132.473.842,00	1.132.473.842,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	75.000.000,00	-45.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	80.190.000,00	91.802.700,00	11.612.700,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	80.190.000,00	91.802.700,00	11.612.700,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.917.154.000,00	7.521.309.000,00	604.155.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.917.154.000,00	7.521.309.000,00	604.155.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.917.154.000,00	7.521.309.000,00	604.155.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.916.212.651,00	31.928.862.994,68	2.012.650.343,68
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.916.212.651,00	31.928.862.994,68	2.012.650.343,68

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASS	SEDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.916.212.651,00	31.928.862.994,68	2.012.650.343,68
5.1.05	Belanja Hibah	7.859.290.384,00	6.294.090.384,00	-1.565.200.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.215.000.000,00	2.347.800.000,00	-1.867.200.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.615.000.000,00	1.997.800.000,00	-1.617.200.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.615.000.000,00	1.997.800.000,00	-1.617.200.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	600.000.000,00	350.000.000,00	-250.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	600.000.000,00	350.000.000,00	-250.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	769.295.384,00	769.295.384,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	769.295.384,00	769.295.384,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	769.295.384,00	769.295.384,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.874.995.000,00	3.176.995.000,00	302.000.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	257.000.000,00	257.000.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	257.000.000,00	257.000.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.579.865.000,00	2.579.865.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.579.865.000,00	2.579.865.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	295.130.000,00	340.130.000,00	45.000.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	295.130.000,00	340.130.000,00	45.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	114.111.660.632,00	107.461.532.080,00	-6.650.128.552,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00

KABAG HUKUM	DAN KANTOR	ASST	SEK	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.022.160.600,00	47.772.014.907,00	12.749.854.307,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.464.269.000,00	6.551.269.000,00	87.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.464.269.000,00	6.551.269.000,00	87.000.000,00
5.2.02.01.03.0001	Belanja Modal Alat Penarik	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.764.269.000,00	1.764.269.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.359.101.000,00	2.850.900.000,00	-508.201.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.359.101.000,00	2.850.900.000,00	-508.201.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.180.000.000,00	2.720.000.000,00	-460.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	179.101.000,00	130.900.000,00	-48.201.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	100.000.000,00	5.050.500,00	-94.949.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	100.000.000,00	5.050.500,00	-94.949.500,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	5.050.500,00	5.050.500,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	175.627.000,00	175.627.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	175.627.000,00	175.627.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	175.627.000,00	175.627.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.508.450.640,00	6.440.311.282,00	3.931.860.642,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	88.300.000,00	1.245.350.945,00	1.157.050.945,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	33.300.000,00	1.245.350.945,00	1.212.050.945,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.023.212.440,00	4.894.741.903,00	2.871.529.463,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.146.451.695,00	3.271.519.500,00	2.125.067.805,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	39.210.750,00	27.781.080,00	-11.429.670,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	324.786.690,00	1.475.265.928,00	1.150.479.238,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	447.906.910,00	103.466.000,00	-344.440.910,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	64.856.395,00	16.709.395,00	-48.147.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	396.938.200,00	300.218.434,00	-96.719.766,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	59.075.000,00	133.725.515,00	74.650.515,00

REVISI	DIREKTOR	ASST II	SEKRET	WAKIL

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	80.121.000,00	103.491.085,00	23.370.085,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	35.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	9.028.600,00	15.919.176,00	6.890.576,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	201.640.000,00	19.536.000,00	-182.104.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.073.600,00	17.546.658,00	5.473.058,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.000.000,00	516.769.000,00	506.769.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	516.769.000,00	506.769.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	51.200.000,00	41.200.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	465.569.000,00	465.569.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.963.905.780,00	17.446.454.724,00	482.548.944,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	16.963.905.780,00	16.963.905.780,00	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	16.963.905.780,00	16.963.905.780,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	482.548.944,00	482.548.944,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	482.548.944,00	482.548.944,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.118.107.000,00	4.477.382.000,00	2.359.275.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.118.107.000,00	4.330.732.000,00	2.212.625.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	170.775.000,00	150.000.000,00	-20.775.000,00
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.947.332.000,00	4.080.732.000,00	2.133.400.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.682.524.280,00	3.397.149.860,00	1.714.625.580,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.408.637.740,00	2.872.199.080,00	1.463.561.340,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.408.637.740,00	2.872.199.080,00	1.463.561.340,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	273.886.540,00	524.950.780,00	251.064.240,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	240.212.890,00	348.614.780,00	108.401.890,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	27.336.000,00	176.336.000,00	149.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.337.650,00	0,00	-6.337.650,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	658.118.528,00	658.118.528,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	658.118.528,00	658.118.528,00
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	0,00	58.118.528,00	58.118.528,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00

KABAG HUMAS	DINASAGUM KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	445.725.000,00	3.269.704.993,00	2.823.979.993,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	2.785.289.993,00	2.785.289.993,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0,00	2.742.789.993,00	2.742.789.993,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	445.725.000,00	484.415.000,00	38.690.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	445.725.000,00	484.415.000,00	38.690.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.370.077.900,00	1.983.278.020,00	613.200.120,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.370.077.900,00	1.983.278.020,00	613.200.120,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.370.077.900,00	1.983.278.020,00	613.200.120,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.947.626.032,00	32.593.344.219,00	-2.354.281.813,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.877.626.032,00	30.333.528.534,00	-3.544.097.498,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.594.018.032,00	29.333.744.534,00	-4.260.273.498,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.047.834.000,00	3.984.268.566,00	-1.063.565.434,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	200.000.000,00	307.000.000,00	107.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	251.455.949,00	251.455.949,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	22.656.283.808,00	21.833.018.408,00	-823.265.400,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	174.800.000,00	0,00	-174.800.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	415.000.000,00	0,00	-415.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.405.446.000,00	1.748.358.580,00	-1.657.087.420,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.130.000.000,00	600.000.000,00	-530.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	149.754.224,00	0,00	-149.754.224,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	203.300.000,00	203.300.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00	208.650.000,00	8.650.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	74.900.000,00	181.900.000,00	107.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.000.000,00	5.000.000,00	-95.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	10.793.031,00	10.793.031,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	283.608.000,00	999.784.000,00	716.176.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	460.434.000,00	460.434.000,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	283.608.000,00	539.350.000,00	255.742.000,00

KABAG MUMUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASS	SEKTA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	99.801.210,00	99.801.210,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	99.801.210,00	99.801.210,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	0,00	99.801.210,00	99.801.210,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.060.000.000,00	2.010.014.475,00	950.014.475,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.060.000.000,00	2.010.014.475,00	950.014.475,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.060.000.000,00	2.010.014.475,00	950.014.475,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.000.000,00	150.000.000,00	140.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.000.000,00	150.000.000,00	140.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.000.000,00	150.000.000,00	140.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.951.874.000,00	22.158.757.678,00	-21.793.116.322,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37.672.674.000,00	19.569.716.711,00	-18.102.957.289,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	23.946.177.760,00	19.569.716.711,00	-4.376.461.049,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	23.946.177.760,00	19.459.868.711,00	-4.486.309.049,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	109.848.000,00	109.848.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	13.726.496.240,00	0,00	-13.726.496.240,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	13.726.496.240,00	0,00	-13.726.496.240,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.669.200.000,00	1.966.520.167,00	-3.702.679.833,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.339.200.000,00	1.966.520.167,00	-3.372.679.833,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.840.000.000,00	200.000.000,00	-2.640.000.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.499.200.000,00	1.766.520.167,00	-732.679.833,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	610.000.000,00	622.520.800,00	12.520.800,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	610.000.000,00	622.520.800,00	12.520.800,00
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	610.000.000,00	622.520.800,00	12.520.800,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	3.942.415.276,00	3.942.415.276,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	1.005.046.720,00	1.005.046.720,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	1.005.046.720,00	1.005.046.720,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0,00	1.005.046.720,00	1.005.046.720,00

KABAG HUKUM	DINABAGAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	2.937.368.556,00	2.937.368.556,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	0,00	2.935.868.556,00	2.935.868.556,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0,00	2.740.336.246,00	2.740.336.246,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	0,00	195.532.310,00	195.532.310,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	190.000.000,00	345.000.000,00	155.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	190.000.000,00	345.000.000,00	155.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.000.000,00	345.000.000,00	155.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	115.000.000,00	95.000.000,00	-20.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	75.000.000,00	250.000.000,00	175.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.026.903.776,94	118.592.069.219,00	-1.434.834.557,94
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.473.563.122,94	2.396.068.233,00	922.505.110,06
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.236.350.798,94	2.176.362.599,00	940.011.800,06
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.236.350.798,94	2.176.362.599,00	940.011.800,06
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.236.350.798,94	2.176.362.599,00	940.011.800,06
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	219.705.634,00	-17.506.690,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	219.705.634,00	-17.506.690,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	219.705.634,00	-17.506.690,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.553.340.654,00	116.196.000.986,00	-2.357.339.668,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	161.419.554,00	0,00	-161.419.554,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	161.419.554,00	0,00	-161.419.554,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	161.419.554,00	0,00	-161.419.554,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	781.493.886,00	781.493.886,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	781.493.886,00	781.493.886,00

KABAG HUKUM	DINAS KANTON	ASS	SEK	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	781.493.886,00	781.493.886,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.391.921.100,00	115.414.507.100,00	-2.977.414.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.391.921.100,00	115.414.507.100,00	-2.977.414.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	48.712.462.100,00	45.735.048.100,00	-2.977.414.000,00
	Jumlah Belanja	857.706.086.308,00	834.393.841.371,87	-23.312.244.936,13
	Total Surplus/(Defisit)	-100.000.000,00	-29.394.604.616,85	-29.294.604.616,85
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000,00	29.394.604.616,85	29.294.604.616,85
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000,00	29.394.604.616,85	29.294.604.616,85
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	22.303.074.390,83	22.203.074.390,83
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000,00	22.303.074.390,83	22.203.074.390,83
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000,00	22.303.074.390,83	22.203.074.390,83
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	7.091.530.226,02	7.091.530.226,02
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	4.434.197.862,93	4.434.197.862,93
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	4.434.197.862,93	4.434.197.862,93
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	0,00	598.366.286,09	598.366.286,09
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	411.151.223,09	411.151.223,09
6.1.01.08.04.0002	Sisa Dana BOSP-BOS Kinerja	0,00	174.008.521,00	174.008.521,00
6.1.01.08.04.0003	Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	1.593.842,00	1.593.842,00
6.1.01.08.04.0005	Sisa Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	11.612.700,00	11.612.700,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	2.058.966.077,00	2.058.966.077,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	2.058.966.077,00	2.058.966.077,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.000.000,00	29.394.604.616,85	29.294.604.616,85
	Pembiayaan Netto	100.000.000,00	29.394.604.616,85	29.294.604.616,85
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Boalemo, 24 Oktober 2025

Bupati



RUM PAGAU